

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Akuntabilitas mencakup suatu pemberian informasi keuangan pada masyarakat luas serta pengguna yang lain sehingga memberikan kemungkinan untuk mereka memberi penilaian atas pertanggungjawaban pemerintah terhadap semua kegiatan yang dijalankan, tidak sebatas kegiatan keuangan saja namun juga berfokus bahwa laporan keuangan pemerintah wajib untuk bisa memberi informasi pada penggunanya yang membutuhkan terkait pembuatan keputusan politik, sosial, dan ekonomi. Akuntabilitas publik artinya yaitu pemberian disclosure dan informasi atas kinerja dan aktivitas finansial pemerintah pada berbagai pihak yang memiliki kepentingan atas laporan tersebut. Pemerintah daerah dan pusat berperan menjadi yang memberikan informasi untuk pemenuhan hak-hak masyarakat. Yuddy Chrisnandi, Menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi memaparkan bahwa menyangkut permasalahan akuntabilitas penyerahan laporan hasil evaluasi kinerja berarti sangatlah krusial untuk membentuk budaya kinerja di lingkup lembaga pemerintahan. Budaya tersebut harusnya diterapkan dengan konsisten lewat penerapan manajemen kinerja yang menekankan kepada pelaksanaan fungsi serta tugas yang harus memberikan kebermanfaatan hasil untuk masyarakat/publik baik langsung ataupun tidak. Paling tidak di tahun ini, hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tiap instansi pemerintah rata-rata paling tidak bernilai 70 (Kompas, 4, januari 2016).

Pembangunan perekonomian jangka panjang sebuah negara akan mengarahkan kepada perubahan mendasar dalam struktur perekonomian negara itu sendiri, yakni menjadi ekonomi modern yang didominasi oleh sektor industri dari yang sebelumnya adalah ekonomi tradisional yang dititik beratkan kepada sektor pertanian. Ketika terjadi krisis pada perekonomian nasional, pada kenyataannya sektor pertanian bisa menopang krisis perekonomian tersebut.

Terkait hal pembangunan pertanian, maka pupuk termasuk unsur yang strategis serta penting untuk meningkatkan produktivitas dan produksi dan juga menjadi bagian dari sistem usahatani. Hadi (2007) memaparkan, pupuk ialah input yang sangatlah penting dalam proses produksi pertanian. Dinyatakan seperti ini sebab bila pupuk tidak ada maka pemakaian input yang lain semacam tenaga kerja, air, maupun benih yang unggul sebatas akan memberi

manfaat marjinal sehingga pada akhirnya menyebabkan pendapatan petani dan produktivitas pertanian rendah.

Distributor pupuk bersubsidi termasuk pula bagian dari produsen pupuk Indonesia untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi pada kelompok tani atau petani lewat pengecer pupuk bersubsidi yang distributor tunjuk. Distributor dalam menunjuk pengecer haruslah sudah memenuhi beberapa syarat sebagaimana aturan Menteri Perdagangan terkait Pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian dalam No.03/MDAG/PER/2/2006. Selain itu juga mengacu aturan terkait Kebutuhan Harga Eceran Tertinggi (HET) dalam Kepmentan RI No.69/Permentan/SR.130/11/2002. Petani yang memperoleh pupuk bersubsidi haruslah tercatat menjadi kelompok tani lewat RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) tidak mendapatkan pupuk bersubsidi meskipun mereka mempunyai lahan pertanian hingga 2 Hektar, sebab syarat perolehannya masihlah belum sesuai target khususnya penyaluran di tingkat pengecer pupuk kepada petani atau kelompok tani. Ini disebabkan oleh pengecer yang belum sadar dalam memegang amanah bahwasanya penyaluran pupuk ini secara dasarnya milik petani atau kelompok tani dan pengecer dalam hal ini belum memahami tanggung jawab dan haknya.

Harga Eceran Tertinggi (HET) yakni harga yang kelompok tani atau petani terima di pengecer (gudang penyalur). Hal yang nyatanya ada di lapangan yaitu pengecer melakukan penjualan pupuk bersubsidi kepada petani yang tidak merupakan pemilik lahan yang tercatat dalam RDKK dengan harga melebihi HET. Kerap kali kelompok tani anggota RDKK tidak memperoleh pupuk dengan keterlambatan masa tanam serta harga yang melebihi HET. Seharusnya pengecer pupuk bersubsidi pada kondisi semacam ini bisa melaksanakan proses penebusan pesanan kelompok tani, akan tetapi kendala yang dihadapi yakni sebab seringkali kelompok tani tidak memiliki dana tunai untuk menebus pada pengecer. Kerap kali kelangkaan pupuk terjadi yang dipicu oleh stok pupuk di lini II yang tidak tersedia sebab terkendala pengiriman dari produsen dengan alasan tidak dapat berlayar sebab cuaca yang buruk, keterlambatan bongkar muat sebab alasan minimnya fasilitas di pelabuhan bongkar muat, dimana seluruhnya ini memicu ketidaksesuaian pendistribusian pupuk dengan apa yang pemerintah harapkan yakni tepat jumlah, tepat harga, serta tepat waktu. Sebenarnya sangatlah perlu melakukan koordinasi dari pihak terkait baik EMKL, distributor, produsen, Dinas Pertanian, serta Dinas Perhubungan yang membidangi bongkar muat. Selain itu juga sangat dibutuhkannya penyuluh pertanian di tingkat kecamatan guna mengetahui peta tanam di masing-masing desa. melalui peta tanam tersebut diharapkan tiap instansi yang berkaitan akan bisa melakukan penyusunan rencana program kebutuhan pupuk.

Mengacu latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti melalui judul **“Akuntabilitas Distribusi Pupuk Bersubsidi”**

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Permasalahan yang bisa dirumuskan dari uraian latar belakang tersebut, yaitu:

1. Apakah peraturan yang ada telah dipahami dan diterapkan oleh para Dinas Pertanian, Produsen, Distributor, petani tersebut?
2. Apakah Dinas Pertanian, Produsen, Distributor, petani tersebut telah menerapkan pencatatan akuntansi yang memadai?
3. Bagaimana Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Pengecer Resmi mengenai penyaluran pupuk bersubsidi mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini, di antaranya:

1. Diharapkan dengan adanya pemahan peraturan tersebut akuntabilitas pupuk bersubsidi akan lebih maju.
2. Membantu petani dalam menggunakan laporan keuangan sehingga dapat digunakan secara berkelanjutan.
3. Untuk membantu para petani dalam penyuluhan yang jelas berguna bagi kehidupan ekonomi.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil dari penelitian ini bisa menjadi acuan untuk civitas akademika serta beberapa pihak yang memerlukan untuk mengimplementasikan konsep dari pembuatan pencatatan akuntansi dan laporan keuangan untuk Dinas Pertanian, Produsen, Distributor.
- b. Bisa memperluas pengetahuan untuk kelompok petani serta untuk peneliti sendiri bisa mengetahui dan memperoleh bukti-bukti empiris terkait faktor-faktor yang mempengaruhi peran Dinas Pertanian Desa Gendol Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi dalam pengelolaan keuangan kelompok petani.

- c. Bisa memperluas sumber referensi keterlibatan Dinas Pertanian Desa Gendol Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi dalam pengelolaan keuangan kelompok tani.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah, bisa dijadikan tinjauan ataupun referensi secara nyata yang menggambarkan seberapa jauh mana kinerja Dinas Pertanian untuk mewujudkan Good Government dan Good Governance.
- b. Bagi Pemerintah Desa Gendol Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi, bisa menjadi referensi untuk pegawai ataupun berbagai pihak dalam Pemerintah Desa supaya terus bekerja secara berwibawa, transparan, dan bersih.
- c. Bisa dipergunakan menjadi contoh praktis dalam membuat laporan keuangan dan pencatatan akuntansi sehingga mempermudah untuk para pihak yang memerlukan pembuatan laporan keuangan. Selain itu pula diharapkan melalui contoh pembuatan sistem pencatatan akuntansi dan laporan keuangan ini para Dinas Pertanian, Produsen, Distributor bisa lebih profesional dalam menjalankan bisnis serta bisa bertahan dalam kedinamisan dan kompleksitas kondisi perekonomian Indonesia saat ini.